



Journal of Government Science Studies
Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>
Vol. 2 No. 1, April 2023, pages: 1-13
e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461
<https://doi.org/10.53730>



Optimalisasi Tugas dan Fungsi Camat dalam Pelayanan Publik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur

Sahidin Rumain^a, Wahab Tuanaya^b, Amir Faisal Kotaromalos^c

Correspondence Email: sahidinfisip@gmail.com

Manuscript submitted: 12-02-2022, Manuscript revised: 04-04-2022, Accepted for publication: 27-04-2023

Keyword:

Task optimization 1;
Public Service 2;
Camat Function 3.

Abstract: The purpose of this research is to describe the optimization of the district head's duties and functions in public services in the Siritaun Widatimur district. This research method is qualitative research with focus on the duties and functions of district head in public services. This study aims to determine the duties and functions of the district head in providing services to the community in the Siritaun Widatimur district. The research methods used are observation, interviews and documentation. Data were obtained from the Siritaun Widatimur district office, namely: district head 1, district secretary 1, officials (karteker) 3, community leaders 5, and youth leaders 5. The results of this study suggest that the optimalization of the functions and duties of the district head in providing public services is considered good, although there are some individuals/persons who are less professional in their work.

Kata Kunci:

Optimalisasi Tugas 1;
Pelayanan Publik 2;
Fungsi Camat 3.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Optimalisasi tugas dan fungsi camat dalam pelayanan publik di kecamatan Siritaun Widatimur. Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan fokus penelitian pada tugas dan fungsi camat dalam pelayanan publik apakah berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Siritaun Widatimur. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode observasi, interview dan dokumentasi. Data diperoleh dari kantor camat Siritaun Widatimur yaitu: camat 1, sekretaris camat 1, pejabat (karteker) 3, tokoh masyarakat 5, dan tokoh pemuda 5. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa optimalisasi fungsi dan tugas camat dalam memberikan pelayanan publik yang cukup dianggap baik, meskipun ada sebagian individu/oknum yang kurang profesional dalam pekerjaannya.

^{a b c} Prodi Ilmu Pemerintahan,
Universitas Pattimura, Indonesia

1 Pendahuluan

Pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya.

Ibukota kecamatan Siritaun Widatimur terletak (Negeri Administrasi Keta Rumadan) berjarak sekitar 80 km ke ibukota Kabupaten (Kecamatan Bula). Di sini bisa memperoleh jarak dengan menarik garis lurus (jarak terdekat) dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten. Sementara itu jarak sesungguhnya yang perlu ditempuh bisa lebih dari jarak tersebut untuk menuju Kecamatan Siritaun Widatimur. Menurut Hadi (2008), kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu: (1). Kecamatan dalam arti kantor camat. (2). Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya. (3). Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya”. Otonomi daerah dibentuk dengan asas desentralisasi kewenangan (Labolo, 2008). Kebijakan dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan intervensi pembangunan (Leinata, Rolobessy, Khairunissa, 2022). Kualitas masyarakat dalam memberikan masukan-masukan yang menentukan kemajuan pembangunan desa (Lebetubun, 2022). Perencanaan yang dilakukan secara untuk melakukan seleksi program (Suryokusumo, 2008). Temuan riset Irmawati (2022), prinsip transparansi masih terdapat adanya keterbatasan sarana dan kurangnya pemahaman masyarakat (Irmawati, Wijaya, Basir, 2022), kesadaran dan kemampuan dan tingkat kecakapan masyarakat dalam meningkatkan penghasilan masyarakat (Noya, 2022), harus adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan public (Ekram, Tuanaya, Wance, 2022).

Saat ini masyarakat Kecamatan Siritaun Widatimur belum sepenuhnya merasakan dan terlaksanannya peraturan bupati kabupaten seram bagian timur no 36 tahun 2017 tentang urain tugas dan fungsi camat di kecamatan Siritaun Widatimur dikarenakan camat sebagai kepala pemerintahan kecamatan yang seharusnya memberikan pemahaman pemberdayaan terhadap masyarakat dalam hal ini perlunya meningkatkan taraf hidup masyarakat kecamatan Siritaun Widatimur dalam mengembangkan sumber daya alamnya misalnya, kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi, dan jambu mette, hasil kekayaan alam ini menjadi satu acuan untuk bagaimana seorang pemerintahan kecamatan memperdayakan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan meliputi kemampuan pribadi, kreatifitas dan kebebasan bertindak (Robinson, 1994). Tujuan pemberdayaan memberikan dan mengalihkan sebagian kekuatan (Pranarka dan Vidhyandinka, 1996). Pemberdayaan memberikan masyarakat mandiri (Sulistiyani, 2004). Pemberdayaan disesuaikan dengan tujuan program pembangunan (Hatu, 2010). Paradigma baru administrasi publik muncul dengan merumuskan serangkaian idealism dan praktik terkait penggunaan nilai dan norma tertentu dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik (Herizal, Mukhrijal, Wance, 2020). Pemberdayaan dilakukan untuk membantu masyarakat (Gasperz, V, 2003). Tata kelola merupakan bagian terpenting dalam pemberdayaan (Moenir, 1992).

Kecamatan Siritaun Widatimur kabupaten seram bagian timur menjadi salah satu penyelenggara pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu sub-sistem pemerintahan di Indonesia, Kecamatan Siritaun Widatimur Menjadikan Kecamatan sebagai percontohan dalam pelaksanaan Tugas-tugas dan

fungsi Pemerintahan kecamatan. Kecamatan Siritaun Widatimur yang terdapat 10 desa administrative, adalah hal ini sebagian masyarakat dalam mata pencariannya ada nelayan dan petani tapi tidak ada pemberdayaan dari seorang camat di kecamatan Siritaun Widatimur pada hal saat ini pasar yang menjadi tempat untuk mengatur putaran ekonomi di lingkup kecamatan Siritaun Widatimur, yang kemudain sudah di sediakan oleh pemerintahan daerah sebagai fasilitasi umum dalam memperdayakan masyarakat Siritaun Widatimur tetapi tidak ada pengawasan serta pemeliharaan ketat dari camat sebagai kepala pemerintahan pada hasilnya pasar saat ini hanya sebagai tempat pembuangan sampah masyarakat.

Kecamatan Siritaun Widatimur yang menjadi pelayanan langsung pemerintahan kecamatan banyak kekurangan yang belum di selesaikan oleh camat kecamatan Siritaun Widatimur dalam hal ini pelayanan yang belum maksimal, pemberdayaan masyarakat, pengawasan, serta kordinasi. Hal ini di sebabkan kedisiplinan kepegawaian kecamatan yang kurang aktif serta tidak masuk kantor. saat ini kantor camat sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat kecamatan Siritaun Widatimur tidak ada aktivitas dalam pengkantoran kecamatan. Oleh sebab itu, camat selaku kepala pemerintahan kecamatan Siritaun Widatimur seharusnya ambil kebijakan untuk di fungsikan kantor kecamatan Siritaun Widatimur serta memberikan kedisiplinan yang tegas untuk seluruh pegawai kecamatan hal ini membuktikan demi kelencaran pemerintahan kecamatan di kecamatan Siritaun Widatimur.

Berdasarkan data dilapangan yang penulis peroleh masih terdapat tugas-tugas dan fungsi camat yang belum berjalan dengan optimal berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 36 Tahun 2017 tentang urain tugas dan fungsi camat Kecamatan Siritaun Widatimur, antara lain:

- 1) penjelasan tugas tugas yang di libatkan kepada pihak kecamatan tidak sesuai atau kurang efektif berdasarkan struktur atau tugas tugas yang ada
- 2) kurangnya pengawasan dan koordinasi terhadap pemerintahan desa dalam menjalankan program kerja dan tanggung jawab yang di imbani.
- 3) kantor camat yang menjadi pusat pelayanan di kecamatan Siritaun Widatimur saat ini tidak di fungsikan karena camat tidak aktif melaksanakan tugasnya dan lebih banyak berada di Kota Kabupaten.
- 4) tidak ada evaluasi di setiap program kerja yang di laksanakan oleh setiap pemerintahan desa oleh kepala kecamatan (camat) Siritaun Widatimur

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe dan jenis kualitatif deskriptif, alasannya peneliti berkeinginan menggali gejala-gejala secara langsung di lapangan dengan bentuk deskriptif, metode ini digunakan karena untuk mempermudah penulis yang bertujuan untuk mengetahui, dan menggambarkan sesuai masalah yang diajukan sebelumnya. (Sanapiah Faisal, 2001).

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Lexy Meleong, 2001).

3 Hasil dan Diskusi

Motivasi Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Siritaun Widatimur

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka organisasi kecamatan seharusnya dapat memahami peran dan kedudukannya dalam menangani dan mampu mencari solusi untuk menghasilkan kinerja yang baik pula. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan camat dalam meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan ditentukan oleh perangkat

organisasi kecamatan seperti aparat pemerintahan Kecamatan. Jadi seorang camat dalam hal ini harus mampu bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi program kerja, mampu memotivasi seluruh perangkat organisasi kecamatan bekerja sesuai dengan formulasi visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya.

Relevansinya dengan uraian diatas, berikut akan disampaikan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mukti Kelery S.IP selaku Camat Siritaun Widatimur diperoleh tanggapannya:

Menurut saya selaku pimpinan dalam lingkup Kecamatan , iya punya kewajiban untuk bagaimana mendorong serta memberikan motivasi kepada masyarakat setiap ada kegiatan, misalnya kegiatan musrembang atau rapat rapat harian. Di setiap desa dan dalam sebutan saya selalu memberikan pemahaman baik kepada masyarakat Cuma saja pejabat desa dalam hal ini karateker di tiap-tiap desa yang ada di kecamatan ini tidak serius dalam melanjutkan apa yang saya sampaikan itu. Hasilnya ketika rapat terkait usulan program pembangunan di desa selalu saja muncul ketidak samaan pemahaman di lingkup masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut Pemerintah kecamatan merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pemerintah dan pembangunan di wilayah kecamatan maupun di desa. Organisasi kecamatan berfungsi menjembatani berbagai aspirasi dalam masyarakat yang masih ada kaitannya dengan masalah pelayanan (*service*) seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan adanya kerja sama antara pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa yang relevan agar mampu mendorong dan memberikan motivasi serta pemahaman yang baik terhadap masyarakat di lingkup kecamatan Siritaun Widatimur.

Berikut adalah wawancara dengan Bahrum Romain S.E sebagai sekretaris kecamatan Siritaun Widatimur dengan Motivasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kecamatan Siritaun Widatimur:

Menurut saya selaku sekretaris kecamatan,saya selalu mendampingi bapak camat ketika beliau menghadiri setiap kegiatan yang menyangkut dengan program pembangunan desa, dan kami dari pemerintahan kecamatan selalu mendorong dan memberikan motivasi yang baik terhadap masyarakat Cuma perlu kita semua ketahui bahwa selaku anak negeri di kecamatan Siritaun Widatimur menilai masyarakat berbeda latar belakang pemahaman,misalnya infrastruktur yang berupa telit yang di buat setiap desa yang ada kecamatan sebagian masyarakat yang setuju dan ada yang yang tidak setuju ini juga kira kira bagitu.

Dari hasil wawancara dengan sekretaris kecamatan Siritaun Widatimur penulis mendiskripsikan bahwa: perlunya sosialisasi yang baik dari pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan desa,agar seluruh masyarakat yang ada kecamatan memahami secara saksama kelebihan dan kekurangan apa bila program yang kemudian di realisasikan kepada masyarakat.

Berikut adalah wawancara dengan bapak Umar Rumadaul S.Pd pejabat (karteker) desa administrative suru Motivasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kecamatan Siritaun Widatimur adalah:

Menurut saya selaku pejabat negeri suru,iya camat selalu hadir di setiap kegiatan yang menyangkut dengan pembangunan desa ,bahkan beliau selalu menyampaikan sambutan itu selalu moniton dengan motivasi dan dorongan tetapi cuma itu lah masyarakat di setiap tiap-tiap negeri ini kan ada yang pro dan kontra atas dasar kepentingan politik berapa bulan lalu ya yang menang yang duduk di pemerintahan saat ini kan kandidat yang menang,dan yang kalah itu juga terdendam maka dari itu pula ketika kami dari pemerintahan ketika membuat sesuatu yang menjadi kepentingan negeri itu selalu ada kelompok-kelompok kecil yang selalu di halangi.

Dari penjelasan kepala desa (karteker) administratif suru Motivasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kecamatan Siritaun Widatimur hal yang hampir sama dikemukakan oleh bapak Rahman Lewataka selaku kepala desa (karteker) administratif Keta Ramadan dan bapak Julkarnain Romain sebagai kepala desa (karteker) administrative nama:

Iya motivasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kecamatan Siritaun Widatimur, camat selalu memberikan dorongan serta motivasi di setiap kegiatan yang menyangkut program kenerja desa. hal baik yang kami dari pemerintahan buat dalam negeri masi saja ada kelompok-kelompok kecil yang selalu menghalangi. ini yang terjadi di kecamatan Siritaun Widatimur hampir semua desa misalnya kegitan bumdes dalam pemberdayaan masyrakat nelayan dan petani.

Dari hasil wawancara dengan pejabat (karteker desa) penulis mendiskripsikan bahwa: politik hadir di tengah-tengan masyakarat juga munculnya berbagai pro dan kontra dalam hal ini ada sebagian masyarakat yang setuju dan ada yang tidak, maka sebagai pemerintahan baik kecamatan maupun desa harus selalu meberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat, dan selalu melaksanakan kegiatan yang bersifatnya mendorong bagi masyarakat agar pembangunan bagi masyarakat terlaksanakan dengan baik.

Berikut adalah wawancara dengan Moh. Ramli Rumakabis selaku ketua pemuda motivasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kecamatan Siritaun Widatimur adalah:

Menurut saya, untuk memberikan motevasi dari pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa memang ada ya, tetapi kami dari kepemudan yang ada di kecamatan siritaun widaitmur ini banyak punya minat dan bakat yang kami miliki selaku ketua pemuda menyarangkan bahwa motivasi secara lisan belum tentu mengembangkan potensi yang kami miliki agar secara efektif apa bila di sertakan dengan praktinya misalnya sepak bola, bola voly, hafiz, qasida, dan lainya

Dari hasil wawancara dengan Moh. Ramli Rumakabis selaku ketua pemuda penulis mendiskripsikan bahwa: kemajuan suatu daerah dapat di lihat dari pada aspek sumber daya manusianya kita lihat kecamatan Siritaun Widatimur, sangat memadai, agar pengembangan potensii generasi kecamatan widatimur di kembangkan dengan baik, maka tanggung jawab pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan desa harus berperang penting dalam mendorong potensi regenerasi di kecamatan Siritaun Widatimur.

Berikut adalah wawancara dengan moh yamin rumakabis selaku tokoh masyarakat Motivasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kecamatan Siritaun Widatimur adalah:

Menurut saya bahwa untuk memberikan motivasi dari camat saya rasa iya ada, motivasi serta dorongan itu di sampaikan ketika ada rapat-rapat terkait desa di lingkup kecamatan siritaun wida timur tetapi kami masyarakat sampai saat ini juga belum merasakan pelayanan dari kantor kecamatan ini hal yang perlu saya sampaikan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyrakat penulis mendiskripsikan bahwa: secara teori saja belum tentu memaksimalkan pemerintahan di ligkup kecamatan oleh karna itu perlu adanya tindakan dalam hal ini pelayanan terhadap masyarakat di lingkup kecamatan Siritaun Widatimur, dan seharusnya kantor camat di aktifkan sebagai wadah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarrakat.

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan Siritaun Widatimur

Selain tugas tersebut, Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja), karena melaksanakan tugas umum mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Sugandha, 1998). Di bidang pembangunan, koordinasi merupakan fungsi manajemen pembangunan yang berkenaan dengan usaha penyatupaduan, sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi dari program-program pembangunan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran secara efektif. Oleh karena itu untuk mewujudkan sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di kecamatan maka Camat selaku Kepala Kecamatan harus dapat menjalankan fungsi koordinasi pembangunan dengan efektif.

Relevansinya dengan urayan diatas, berikut akan disampaikan hasil wawancar penulis dengan Bapak Mukti Kelery S.IP selaku camat Siritaun Widatimur diperoleh tangapanya:

Menurut saya bahwa, kordinasi antara pemerintahan kecamatan dengan desa saya sudah dilaksanakan dari berbagai kegiatan selalu saya selalu tegaskan bahwa ketika meningkatkan pembangunan di lingkup kecamatan Siritaun Widatimur berjalan secara efektif maka hubungan kordinasi ini sangat penting. tetapi ada juga desa yang belum sampai taraf yang kami inginkan sebab orang-orang yang di tepatkan dalam sturktur desa sebagian yang kurang koputen dan juga kurang aktif juga, misalnya yang saya temui ketika rapat dengan pemerintahan desa di kecamatan Siritaun Widatimur yang hadir hanya pejabat dan sekretaris desa saja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut Kordinasi Camat dalam pembangunan di Kecamatan Siritaun Widatimur sudah baik dan cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu sarana koordinasi yang ada seperti rapat koordinasi, forum konsultasi, pelaporan, permintaan data/informasi perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Koordinasi yang baik dan efektif hanya dapat terwujud secara optimal apabila ada kerjasama yang baik dan harmonis antara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasikan. Untuk hal ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya dalam koordinasi pembangunan di kecamatan Siritaun Widatimur. Hal penting yang perlu dilakukan adalah menjalin komunikasi yang efektif diantara semua unsur yang terlibat atau terkait dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

Berikut adalah wawancara dengan Bahrum Rumain S.E sebagai sekretaris kecamatan Siritaun Widatimur terkait kordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan Siritaun Widatimur:

Menurut saya, saya selalu mendampingi Bapak Camat di setiap kegiatan baik desa maupun kecamatan sebagaimana Pasal 4 (1) tentang fungsi Sekretariat kecamatan Siritaun Widatimur mempunyai tugas membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan urusan umum, Kepegawaian, keuangan dan pelayanan teknis administrative tetapi banyak hal kemudian kami temukan bahwa sebagaian pejabat dan kaur-kaur pemerintahan ini juga kadang aktif ketika pembagian BLT (bantuan langsung tunai) atau APBD (anggaran pendapatan belanja desa) sudah di cairkan dan kami dari pemerintahan kecamatan selalu kordinasikan kepada pemerintahan desa agar memberikan ketegasan kepada kau-kaur yang aktif kita menjalankan program kerja di lingkup Kecamatan Siritaun Widatimur.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut: kordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan Siritaun Widatimur sangat penting, tetapi perlu ada pelatihan khusus dari pemerintahan kecamatan terhadap pemerintahan desa agar pemerintahan ini berjalan dengan baik di kepada pejabat negeri agar tetap memberikan sebagaimana Pasal 4 (1) tentang fungsi Sekretariat kecamatan Siritaun Widatimur mempunyai tugas membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan urusan umum, Kepegawaian, keuangan dan pelayanan teknis administrative, artinya bahwa peraturan daerah ini juga seharusnya di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

Berikut adalah wawancara dengan bapak Umar Rumadaul selaku pejabat negeri (karteker) di kecamatan Siritaun Widatimur terkait kordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan Siritaun Widatimur

Menurut saya bahwa, dari pemerintaahan kecamatan dalam hal ini camat selalu melakukan kordinasi terkait pembangunan di lingkup kecamatan maupun kordinasi terkait program pembangunan dari desa Cuma saja memang kami dari pemerintahan desa juga sangat berharap dari kecamatan agar di fungsikan kantor kecamatan sehinga ketika pelayanan public di kecamatan Siritaun Widatimur itu kami tidak lagi berangkat ke kediaman Bapak Camat di bula, minta tanda tangan, cap, dan administarsi lainnya, dan sajaw ini belum ada pelayanan yang berupa terbuka kepada masyarakat di kecamatan Siritaun Widatimur

Dari penjelasan kepala desa (karteker) administratif suru kordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan Siritaun Widatimur hal yang hampir sama dikemukakan oleh bapak Rahman Lewataka selaku kepala desa (karteker) administratif Keta Rumadan dan bapak Julkarnain Rumain sebagai kepala desa (karteker) administrative:

Adanya kordinasi dari pemerintahan kecamatan terkait pembangunan di kecamatan Siritaun Widatimur, tetapi mengharapkan pemerintahan desa saja belum maksimal dalam kordinasi antara pemerintahan kecamatan dengan pemerintahan desa (karteker) maka dari itu pemerintahan kecamatan harusnya lebih optimal dalam meningkatkan pelayanan di kecamatan Siritaun Widatimur serta pagawai kecamatan yang harus aktif dalam kantor sehingga masyarakat atau kmi dari pemerintahan desa lebih mudah lagi dalam pengurusan di kecamatan Siritaun Widatimur.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut: perlunya keterlibatn semua elemen masyarakat dalam pengembangan potensi-potensi di kecamatan Siritaun Widatimur, serta kantor camat sebagai wadah, agar efesiensi dalam memberikan pelayanan mengaktifkan sarana prasana yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan di kacamatan Siritaun Widatimur.

Berikut adalah wawancara dengan ketua pemuda di kecamatan Siritaun Widatimur terkait kordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan Siritaun Widatimur

Menurut saya bahwa pelaksanaan kordinasi di lingkup kecamatan Siritaun Widatimur suda di kordinasikan tetapi kami pemuda di desa desa ini juga banyak pekerjaan yang belum di kerjakan oleh camat serta pagawai kecamatan dalam hal ini misalnya pengembangan minat dan bakat di kecamatan Siritaun Widatimur, hal ini bisa saja selaku pemuda menilai bahwa belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan Siritaun Widatimur.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut: partisipasi pemuda dalam lingkup kecamatan itu sangat penting, Perlu adanya keterlibatan kepemudaan di lingkup kecamatan dalam hal ini misalnya kordinasi terkait program kerja dan kegiatan lainya yang orientasinya terhadap masyarakat di lingkup kecamatan Siritaun Widatimur dan pengembangan minat dan bakat yang menjadi potensi yang dimiliki oleh generasi di lingkup kecamatan menjadi salah satu kemajuan negeri, dan juga adanya partisipasi seluruh pegawai di kecamatan agar efesiensi dalam melakukan pelayanan dengan baik.

Berikut adalah wawancara dengan tokoh masyarakat di kecamatan Siritaun Widatimur terkait kordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan Siritaun Widatimur

Menurut saya bahwa, saat ini persoalan kordinasi iya ada tetapi hanya pembicaraan dari camat dan seluru pagawai di kecamatan saja, sampai saat ini kami masyarakat di kecamatan Siritaun Widatimur belum sepenuhnya merasakan pelayanan dari kantor kecamatan misalnya, saya membuat KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga) itu langsung di kantor capil di bula. apalagi saat kami masyarakat membutuhkan pelayanan yang baik dari pihak kecamatan sehingga hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarkat kami tidak lagi ke bula langsung saja di kantor kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut: kepentingan masyrakat adalah bentuk dari pada kesuksesan suatu pemerintahan di lingkup kecamatan, perlu adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di lingkup kecamatan sehingga hubungan kordinasi antara pihak pemerntahan kecamatan dan masyarakat bukan hanya sebagai teori saja tetapi perlunya adanya tidakan sehingga masyarkat merasa puas terhadap pemerintahan kecamatan saat ini. Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan kecamatan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari sector terus di kembangkan dalam usaha mencapai tujuan tersebut.

Tugas pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan Siritaun Widatimur

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. bahwa Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan kewenangan pengawasan terhadap pemerintahan

desa. Tugas Camat dalam pengawasan pemerintahan desa menurut PP.19/2008 meliputi antara lain: melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa.

Relevansinya dengan uraian diatas, berikut akan disampaikan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mukti Kelery S.IP selaku camat Siritaun Widatimur diperoleh tanggapannya:

Menurut saya, soal pengawasan terus menerus saya selalu sampaikan di setiap kepala pemerintahan desa (karteker) bahwa untuk kelancaran pemerintahan kecamatan langkah awal yang harus di binahi dalam pemerintahan ini adalah pejabat dalam hal ini karteker harus melakukan kedisiplinan terhadap struktur pemerintahan desa, sebab ada beberapa kau-kaur pemerintahan yang kurang disiplin, walaupun kami dari pemerintahan kecamatan banyak kekurangan. misalnya pelayanan langsung dari kantor terkait kebutuhan masyarakat kecamatan Siritaun Widatimur bukan berarti saya tidak melakukan tugas dan fungsi saya sebagai kepala pemerintahan kecamatan,

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut: perlunya peningkatan kedisiplinan terhadap structural pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa (karteker), agar efisiensi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, sebab membutuhkan pelayanan yang baik dari pemerintahan adalah harapan yang di nantikan oleh masyarakat saat ini. Oleh karena itu langkah awal yang seharusnya di ambil oleh pemerintahan kecamatan adalah bagaimana membina struktur kecamatan dan structural pemerintahan desa (karteker) Agar efektif dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan Siritaun Widatimur.

Berikut adalah wawancara dengan Bahrum Rumain S.E sebagai sekretaris kecamatan tugas pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan Siritaun Widatimur

Menurut saya, selaku sekretaris kecamatan selalu membantu camat selalu memberikan pengawasan terhadap pembangunan di lingkup kecamatan dan program pembangunan di setiap desa-desa tetapi itulah banyak titik kelemahan dalam pemerintahan desa yang belum saja di selesaikan oleh pejabat (karteker), misalnya struktur yang saat ini kau-kaur yang kurang aktif dan minimnya pemahaman pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut: saya piker bahwa perlunya pengawasan yang efektif terhadap pemerintahan dan sebagai Tugas Camat dalam pengawasan pemerintahan desa menurut PP.19/2008 meliputi antara lain: melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa, dan perlu adanya sosialisasi dari pemerintahan kecamatan terkait PP atau PERDA Sehingga kepala pemerintahan serta kaur-kaur bisa memahami topuksinya masing-masing.

Berikut adalah wawancara dengan Umar Rumadaul S.Pd sebagai pejabat (karteker) tugas pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan Siritaun Widatimur

Menurut saya bahwa, pengawasan dari pemerintahan kecamatan iya ada di setiap kegiatan terkait program pembangunan di setiap desa-desa yang ada di lingkup kecamatan Siritaun Widatimur camat selalu hadir dalam memberikan pengawasan, tetapi di sisi lain kami juga mengharapkan pemerintahan kecamatan harus optimal. Sebab ketika ingin melakukan aktifitas di kantor camat dalam hal ini, mengurus surat, dan administrasi lainnya itu tidak di kantor tetapi di rumah pribadinya.

Dari penjelasan kepala desa (karteker) administratif suru tugas pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan Siritaun Widatimur hal yang hampir sama, dikemukakan oleh bapak rahman lewataka selaku kepala desa (karteker) administratif keta rumadan dan bapak julkarnain rumain sebagai kepala desa (karteker) administrative nama:

Pengawasan pembangunan iya camat selalu hadir, memberikan pengawasan pembangunan tetapi kami dari pemerintahan desa juga memerlukan pengawasan langsung dari kantor

camat,dalam hal ini pelayanan sebab kami dari pemerintahan desa juga sangat membutuhkan pemerintahan kecamatan misalnya pengurusan administrasi yang menjadi urusan pemerintahan desa di pusat kabupaten misalnya bantuan PKH (program keluarga harapan) kepada masyarakat yang seharusnya ada cap dari kantor camat serta tanda-tanda tangan dari camat ini tidak di kantor tetapi pelayanan dari rumah pribadi di Bula.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut: seharusnya pemerintahan kecamatan harus di optimalisasikan, sehinga pemerintahan baik dari kecamatan ke pemerintahan desa seharusnya harmonis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kedisiplinan terhadap pegawai kecamatan sehingga masyarakat kecamatan merasakan serta sentuha pelayanan di lingkup kecamatan Siritaun Widatimur.

Berikut adalah wawancara dengan Ramli Rumakabus sebagai tokoh pemuda tugas pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan Siritaun Widatimur.

Menurut saya, pengawasan pembagunan memang ada tetapi saat ini kami masyarakat dan terlebih khusnya juga pemuda, kami membutuhkan pelayanan dari pihak kecamatan, sebab saat ini pergantian pimpinan sud tiga pemimpin dari bapak Mukti Kelery S.ip ke bapak Imran lewataka S.ip dan sampai bapak mukti kelery untuk prodi keduanya tetapi kami merasakan sama saja tidak ada perubahan pemerintahan yang ada di kecamatan Siritaun Widatimur.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut: perlunya peningkatan operator pemerintahan kecamatan sehinga pengawasan pembangunan di kecamatan siritaun widatimur berjalan sesuai tugas dan fungsinya,sehinga pemberdayaan terhadap masyarakat baik tingkat pelayanan,pembangunan,dan administrasi lainnya sesuai dengan harapan dan visi misi bupati kabupaten seram bagian timur.oleh karna itu perlunya kantor sebagai wadah pusat pelayanan yang ada di kecamatan Siritaun Widatimur seharusnya di aktifkan sehingga pelayanan bukan hanya camat serta pegawai kecamatan yang melakukan pengawasan di setiap rapat atau musrembang di setiap desa yang ada di kecamatan tetapi kantor juga sebagai pelayan dan sekaligus pengawasan terhadap stockholder yang ada di kecamatan Siritaun Widatimur.

Berikut adalah wawancara dengan tokoh masyarakat tugas pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan Siritaun Widatimur.

Menurut saya, camat selalu hadir memberikan pengawasan di setiap desa-desa di kecamatan Siritaun Widatimur tetapi ada momen tertentu saja camat turun memberikan pengawasan,barang tentu kami masyarakat saat ini belum merasakan sentuhan terkait pembangunan yang di Siritaun Widatimur misalnya pasar yang ada di pusat kecamatan (negeri keta rumadan) saat ini seharusnya pemerintahn kecamatan ambil langka untuk bagaimana di fungsikan,sebab kami masyarakat beli sayur,ikan dan bahan-bahan dapur lainnya itu saja kami menungu-nungu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut:pemerintahan kecamatan seharusnya lebih mengfungsikan semua asset yang menjadi pengawasan di lingkup kecamatan Siritaun Widatimur terutama yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti pasar,dan pemerintahan kecamatan lebih melibat kan semua organisasi tingkat kecamatan misalnya KNPI kecamatan,dan lembaga-lembaga masyarakat di lingkup kecamatan siritaun widatimur sehingga sama-sama mengawal program pembangunan yang ada di kecamatan Siritaun Widatimur,serta peningkatan pemberdayaan terhadap masyarakat di kecamatan Siritaun Widatimur.

Evaluasi Program Pemberdayaan Di Kecamatan Siritaun Widatimur

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat berparti sipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan pengaruh terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi hidupnya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatianny salah satu tugas pokok camat sebagai pemimpin kecamatan adalah melaksanakan koordinasi kegiatan atau program

pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kecamatan yang meliputi dorongan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembanguna lingkup kecamatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja yang mempunyai program dan kegiatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan, melakukan evaluasi, berbagai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan

Terkait dengan evaluasi program pemberdayaan menurut saya sudah dilakukan oleh pihak kami, karena evaluasi guna untuk mengetahui, dampak maupun keberhasilan dari sebuah program kepada masyarakat, dari evaluasi sudah sangat baik tingkat pelayanan yang kami lakukan, terhadap masyarakat, meski dalam program masi ada kendala-kendala yang dihadapi.saya selaku pemerintahan kecamatan saat ini banyak kekurangan yang kami alami misalnya kantor kecamatan dari masa prodi pertama dalam kondisi baik sebab semua fasilitasi di kantor kecamatan lengkap sesuai bidang-bidang pemerintahan,tetapi pergantian pemerintahan dari saya kepada bapak Imran lewataka dan setelah itu saya prodi keduanya semua fasilitasi semuanya tidak lagi di kantor entah di kemanakan ini yang tidak di ketahui oleh seluru masyarakat kecamatan Siritau Widatimur,tetapi pelayanan,evaluasi atau pengawasan pemerintahan saya selalu lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan bapak camat Mukti Kelery, S.IP. terkait dengan evaluasi program pemberdayaan di Kecamatan Siritau Widatimur. maka penulis mendiskrisikan.

Evaluasi sudah dilaukan oleh camat Siritau Widatimur terkait dengan pemberdayaan, karena lewat evaluasi bisa diketahui keberhasilan dari sebuah program yang dijalankan, dari evaluasi diketahui proses pelayanan masih belum terlalu maksimal karena ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintahan kecamatan Siritau Widatimur,tetapi dari evaluasi tersbut bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran terhadap pemerintah kecamatan sehinga kedepan lebih maksimal dalam pelayanan terhadap masyarakat dan perlunya adanya perubahan di setiap pergantian pemerintahan kecamatan dalam hal ini camat.

Berikut adalah wawancara dengan Sekertaris Bapak Bahrum Romain, SE. terkait dengan evaluasi program pemberdayaan di Kecamatan Siritau Widatimur.

Evaluasi sendiri saya pikir hampir sama dengan yang disampaikan dengan bapak camat sendiri evaluasi sudah dilakukan oleh pihak pemerintah kecamatan guna untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu program yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan, dari evaluasi sendiri ada sebagian pendapat masyarakat bahwa pelayanan yang dilakukan oleh kami masi tidak terlalu baik sebab kami dari pemerintahan kecamatan juga banyak kekurangan seperti kurangnya fasilitasi dalam kantor dan saat ini saya selaku sekertaris camat yang tugas sederhananya melengkapi administarasi dalam kantor camat pun tidak fasilitasi misalnya computer,ini yang saat ini menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap seluruh masyarakat kecamatan Siritau Widatimur.

Dari hasil wawancara dengan Sekertaris Bapak Bahrum Romain, SE. terkait dengan evaluasi program pemberdayaan di Kecamatan Siritau Widatimur. Maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut.

Evaluasi merupan sebuah proses sehinga bisa mengetahui keberhasilan dari sebuah program yang dijalankan, oleh pemerintah kecamatan sendiri, evaluasi juga dijadikan sebagai sebuah proses pembelajaran untuk pemerintah kecamatan sehingah nantinya dapat menjalankan program kepada masyarakat dengan baik kedepanya.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak kepala desa (Karteker) Umar Rumadau S.Pd terkait dengan evaluasi program pemberdayaan di Kecamatan Siritau Widatimuri.

Terkait dengan evaluasi sendiri dari pihak pemerintah kecamatan kepada masyarakat terkait dengan program pelayanan terhadap masyarakat, itu sendiri sudah dilaksanakan dan adanya sedikit temuan dari evaluasi itu sendiri dimana ada, sebagian masyarakat yang masi merasah tingkat palayanan di kantor camat sendiri masi kurang baik, karena kantor camat juga terkadang tidak difungsikan dengan baik, artinya bawahan pemerintahan kecamatan sendiri jarang untuk masuk, di kantor camat.sehingah sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan

di kecamatan Siritaun Widatimur.

Dari penjelasan kepala desa (karteker) Administratif Suru terkait dengan evaluasi program pemberdayaan di Kecamatan Siritaun Widatimuri hal yang hampir sama, di kemukakan oleh bapak rahman lewataka selaku kepala desa (karteker) administratif keta rumadan dan bapak julkarnain rumain sebagai kepala desa (karteker) administrative nama:

Program yang kami pemerintahan desa (karteker) rancangan itu selalu di evaluasi oleh camat, dan banyak masukan dari masyarakat agar pelayanan di kantor camat seharusnya di aktifkan yang merupakan temuan, agar menjadi evaluasi bagi pemerintahan kecamatan dan juga pelayanan dari pemerintahan kecamatan saat ini tidak baik misalnya pegawai yang sampai saat ini tidak masuk kantor kecamatan hampir 3 tahun.

Dari hasil wawancara diatas dengan Bapak kepala desa (Karteker) Umar Rumadaul S.Pd terkait dengan evaluasi program pemberdayaan di Kecamatan Siritaun Widatimuri. maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut.

Seharusnya pihak pemerintah kecamatan dalam tingkat pelayanan, harus lebih maksimal lagi sehingga masyarakat bisa dengan baik mendapatkan pelayanan di kantor camat, karena pemerintah kantor camat sendiri tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya, karena ada sebagian masyarakat yang merasa tidak mendapat pelayanan yang baik. Oleh pemerintah kecamatan sendiri. oleh karna itu perlunya peningkatan pelayanan yang baik sesuai dengan visi dan misi bupati kabupaten seram bagian timur sehingga masyarakat merasakan langsung pelayanan yang baik dari pemerintahan kecamatan Siritaun Widatimur.

Berikut adalah hasil wawancara dengan ketua pemuda Ramli Rumakbis terkait dengan evaluasi program pemberdayaan di Kecamatan Siritaun Widatimuri.

Menurut saya evaluasi pelayanan maupun kinerja terkait dengan pemerintah kecamatan sendiri harus lebih diutamakan karena, kita ketaui proses pelayanan yang ada sekarang di kantor camat sendiri masi sangat tidak maksimal karena para pegawai kantor camat sendiri bisa dikatakan tidak difungsikan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat sangat resah dengan pelayanan yang ada sekarang.

Dari hasil wawancara dengan ketua pemuda Ramli Rumakabis terkait dengan evaluasi program pemberdayaan di Kecamatan Siritaun Widatimuri, maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut.

Pelayanan maupun kinerja harus lebih diperhatikan oleh pemerintah kecamatan karena ada sebagian masyarakat yang masi belum mendapatkan pelayanan dengan baik karena, kantor camat sendiri jarang digunakan dengan baik oleh pemerintah kecamatan sendiri sehingga sangat berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat. oleh karna itu pemerintahan kecamatan lebih meningkatkan pelayanan dilingkup kecamatan Siritaun Widatimur sebab evaluasi bagi pemerintah adalah bagaimana mengetahui kelebihan dan kekurangan baik pemerintahan tingkat kecamatan maupun pemerintahan tingkat desa di kecamatan Siritaun Widatimur.

Berikut adalah wawancara dengan masyarakat terkait dengan evaluasi program pemberdayaan di Kecamatan Siritaun Widatimuri.

Evaluasi sendiri merupakan upaya agar mengetahui keberhasilan dari suatu instansi itu sendiri dalam kinerjanya, tetapi sejauh ini yang saya lihat kinerja dari pemerintah kecamatan sendiri tidak optimal dalam pelayanan publik, karena para oknum pemerintahan sendiri kalau mau dilihat tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga berdampak pada masyarakat ini sendiri.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat terkait dengan evaluasi program pemberdayaan di Kecamatan Siritaun Widatimuri, maka penulis mendiskripsikan sebagai berikut.

Pemerintah kecamatan sendiri harus lebih optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, dapat menjalankan secara profesionalisme karena kurangnya kinerja dari pemerintah kecamatan sangat berdampak pada pelayanan masyarakat, sementara kita sendiri ketahu masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang baik dari pemerintahan kecamatan, dan pemerintahan kecamatan perlunya peningkatan mutu pelayanan di kantor kecamatan

- 12 Widatimur serta di optimalkan pemerintahan kecamatan.

4 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan hasil analisis sebagaimana telah disampaikan pada bab VI, diperoleh berdasarkan pada kesimpulan sebagai temuan peneltiaian yaitu:

- 1) Pemerintah kecamatan merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pemerintah dan pembangunan di wilayah kecamatan maupun di desa. Organisasi kecamatan berfungsi menjembatani berbagai aspirasi dalam masyarakat yang masih ada kaitannya dengan masalah pelayanan (*service*) seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat, oleh karna itu di butuhkan adanya kerja sama antara pemerintahan kecamatan dan pemeritahan desa yang relevan agar mampu mendorong dan memberikan motivasi serta pemahaman yang baik terhadap masyarakat di lingkup kecamatan Siritaun Widatimur.
- 2) Kordinasi Camat dalam pembangunan di Kecamatan Siritaun Widatimur sudah baik dan cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu sarana koordinasi yang ada seperti rapat koordinasi, forum konsultasi, pelaporan, permintaan data/informasi perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Koordinasi yang baik dan efektif hanya dapat terwujud secara optimal apabila ada kerjasama yang baik dan harmonis antara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasikan. Untuk hal ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya dalam koordinasi pembangunan di kecamatan Siritaun Widatimur. Hal penting yang perlu dilakukan adalah menjalin komunikasi yang efektif diantara semua unsur yang terlibat atau terkait dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan.
- 3) Seharusnya pemerintahan kecamatan harus di optimalisasikan, sehinga pemerintahan baik dari kecamatan ke pemerintahan desa seharusnya harmonis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kedisiplinan terhadap pagawai kecamatan sehingga masyarakat kecamatan merasakan serta sentuha pelayanan di lingkup kecamatan Siritaun Widatimur.
- 4) Evaluasi merupakan sebuah proses sehinga bisa mengetahui keberhasilan dari sebuah program yang dijalankan, oleh pemerintah kecamatan sendiri, evaluasi juga dijadikan sebagai sebuah proses pembelajaran untuk pemerintah kecamatan sehingah nantinya dapat menjalankan program kepada masyarakat dengan baik kedepanya.

Referensi

- A.S Moenir. (1992). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Gasperz, V. (2003). *Metode Analisis Untuk Peningkatan Kualitas*, Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama
- Dharmawan, Arya Hadi., 2008, *Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan*. Project Working Paper No. 07, Bogor.
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik Kantor Manunggal Satu Atap Provinsi Maluku. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1-13.
- Faisal, Sanapiah. (2001). *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Ferry, R. Anggoro Suryokusumo. (2008). *Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur P* 13 n. Yogyakarta: Sinergi Publishing
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1).

- Lainata, R. P., Rolobessy, M. J., & Khairunnisa, A. (2022). Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Masyarakat Kecamatan Sirimau. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 39-49.
- Lebetubun, J. (2022). Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Ohoi Elaer Lamagorang Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Maluku Tenggara. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 28-37.
- Labolo, Muhadam., 2008, Memahami Ilmu Pemerintahan. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong Lexy J., (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya: Bandung
- Noya, J. (2022). Proses Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Pada Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 95-104.
- Ndraha Taliziduhu. (2005). Teori Budaya Organisasi, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tuanaya, W., & Wance, M. (2021). Wayame village government partnership pattern in handling COVID 19 in Ambon city. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3).
- Wijaya, A. A. M., & Basir, M. A. (2022). Transparansi Pelayanan Publik dalam Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 50-57.